

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 10 Maret 2011 Halaman: 14

Panwaslu waspadai pelanggaran pilkada

Oleh Anggraenny Prajayanti HARIAN JOGJA

JOGJA: Panwaslu Kota Jogja mewaspadai sejumlah pelanggaran yang sering terjadi di tiap tahapan pemilu. Masingmasing tahapan memiliki jenis pelanggaran berbeda. Seperti misalnya di tahap persiapan saat ini, temuan pelanggaran yang kerap terjadi umumnya di permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) ganda.

"Karena itu kami akan kawal mulai dari proses pemutakhiran data pemilih hingga hasilnya nanti," kata Ketua Panwaslu Kota Jogja, Heri Joko Setyo, Rabu (9/3).

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran tersebut, Panwaslu akan memantau kerja KPU, PPK, PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), apakah mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau tidak. Namun dengan adanya pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) diharapkan bisa membantu meminimalisasi kesalahan dan memudahkan PPDP.

Adanya beberapa bakal calon walikota dan wakil walikota yang mulai turun ke masyarakat dikatakan Heri, Panwaslu memang belum bisa berbuat banyak. "Harus dilihat dulu memenuhi unsur kampanya atau tidak seperti misalnya dilakukan besar-besaran, terstruktur atau tidak dan sistematis atau tidak," ujarnya.

Lagi pula saat ini belum memasuki masa pendaftaran sehingga belum bisa dipastikan mereka sebagai calon walikota atau tidak,

Selain masalah daftar pemilih, yang juga harus diwaspadai adalah tindak money politics. Di pilkada kali ini ketentuan pidananya lebih jelas karena diberlakukan kepada setiap orang, bukan pasangan atau tim sukses. Heri juga menambahkan jenis pelanggaran lain yang juga banyak menjadi aduan yaitu penyalahgunaan jabatan dan penggunaan fasilitas negara.

Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Jogja, Darmanto menambahkan selama ini panwaslu juga sudah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak. Seperti misalnya yang dilakukan 24-26 Februari lalu ke Kapolresta dan Kejari mengenai pelatihan penanganan pelanggaran. Setiap pelanggaran diberi masa pelaporan selama tujuh hari.

karta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005